



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ::::

LAPORAN EVALUASI

TERHADAP HASIL RENCANA KERJA

2025



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Dasar Hukum	4
C. Tujuan dan Manfaat	5
D. Ruang Lingkup	5
E. Metodologi Evaluasi	6
F. Sistematika Penulisan Laporan	7
BAB II GAMBARAN KEBIJAKAN RENJA TAHUN 2025	8
A. Visi dan Misi RENJA Tahun 2025	8
B. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sesuai RENJA Tahun 2025	9
C. Target Kinerja Rencana Kerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025	12
BAB III EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TAHUN 2024	23
A. Evaluasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2025	23
B. Analisis Capaian Kinerja	27
a. Indikator dengan capaian sangat Tinggi	27
b. Indikator dengan Capaian Baik (Belum Optimal)	28
C. Analisis Efisiensi dan Efektivitas	28
a. Efisiensi Penggunaan Anggaran	28
b. Efektivitas Program	28
D. Faktor Pendorong	28
E. Evaluasi Penghambat	29
F. Tindak Lanjut Penyelesaian Faktor Penghambat	30
BAB IV PENUTUP	32
A. Tingkat Capaian Kinerja Rencana Kerja BKD Tahun 2025	32
B. Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut Perencanaan Berikutnya	32

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dapat disusun dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam RENJA Tahun 2025. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian kinerja, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi, serta merumuskan langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan perbaikan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Palangka Raya, 31 Maret 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



LISDA ARIYANA, S.Sos

Perencana Utama Madya

NIP. 19680901 198 911 2 005

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap perangkat daerah wajib menyusun perencanaan kinerja yang terukur, sistematis, dan berkelanjutan. Salah satu dokumen perencanaan tersebut adalah Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Oleh karena itu, pelaksanaan RENJA BKD Tahun 2025 perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja.

Evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA BKD Tahun 2025 merupakan bagian penting dalam siklus manajemen kinerja yang bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat, serta merumuskan tindak lanjut perbaikan pada periode perencanaan berikutnya. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan hasil evaluasi, diketahui bahwa pelaksanaan program dan kegiatan BKD Tahun 2025 secara umum menunjukkan capaian kinerja yang meningkat secara bertahap dari triwulan ke triwulan hingga mencapai kategori sangat tinggi pada akhir tahun, dengan realisasi kinerja mencapai 100% . Hal ini menunjukkan adanya efektivitas dalam pelaksanaan program, didukung oleh koordinasi yang baik antar stakeholder, ketersediaan sumber daya, serta dukungan kebijakan yang memadai.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, antara lain adanya dinamika kebijakan dan regulasi baru yang berdampak pada pelaksanaan program serta kebutuhan peningkatan kualitas manajemen ASN berbasis digital. Oleh karena itu, evaluasi ini juga diarahkan untuk memberikan rekomendasi strategis dalam rangka optimalisasi digitalisasi manajemen ASN dan penguatan implementasi manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Sejalan dengan hal tersebut, penyusunan Laporan Evaluasi RENJA BKD Tahun 2025 menjadi penting sebagai bahan:

1. Pengendalian dan penilaian pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya;
3. Penyusunan kebijakan strategis di bidang kepegawaian;
4. Penguatan akuntabilitas kinerja BKD dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja BKD Tahun 2025 sekaligus menjadi dasar dalam peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program kepegawaian di masa mendatang.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);

7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025;
8. Rencana Strategis (Renstra) BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah;
9. Perjanjian Kinerja (PK) BKD Tahun 2025, sebagai dasar pengukuran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah.

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penyusunan Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini diantaranya:

1. Menilai tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan BKD Tahun 2025.
2. Mengidentifikasi permasalahan, hambatan, serta faktor pendukung kinerja.
3. Menjadi dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Adapun manfaat disusunnya Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

1. Sebagai bahan pengendalian dan peningkatan kualitas kinerja BKD.
2. Mendukung pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan kepegawaian.
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam kerangka SAKIP.

D. Ruang Lingkup

Secara umum ruang lingkup Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. Evaluasi Perencanaan Kinerja

Penelaahan kesesuaian antara dokumen RENJA dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Renstra BKD 2025–2029, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, serta kebijakan pembangunan daerah.

2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Analisis pelaksanaan seluruh program dan kegiatan BKD Tahun 2025, termasuk tingkat capaian output dan outcome.

3. Evaluasi Capaian Kinerja

Pengukuran dan analisis terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta indikator kinerja kegiatan.

4. Evaluasi Realisasi Anggaran

Analisis penyerapan anggaran, efisiensi, dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian kinerja.

5. Identifikasi Permasalahan dan Faktor Pendukung

Inventarisasi kendala, hambatan, serta faktor keberhasilan dalam pelaksanaan RENJA.

6. Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Penyusunan rekomendasi strategis sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada periode berikutnya.

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi evaluasi dalam penyusunan Laporan Evaluasi RENJA BKD Tahun 2025 dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Evaluasi Kinerja (Performance-Based Evaluation)

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, baik pada tingkat program, kegiatan, maupun Indikator Kinerja Utama (IKU).

2. Pendekatan Value for Money

Evaluasi menilai aspek:

- **Ekonomis** (ketepatan penggunaan anggaran),
- **Efisiensi** (perbandingan output dengan sumber daya),
- **Efektivitas** (tingkat pencapaian target kinerja).

3. Pendekatan Analisis Deskriptif-Kuantitatif

Analisis dilakukan melalui:

- Data kuantitatif (capaian kinerja, realisasi anggaran),
- Data kualitatif (analisis kendala, faktor pendukung, dan keberhasilan).

4. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui:

- Studi dokumen (RENJA, Renstra, PK, laporan kinerja, laporan keuangan),
- Data monitoring dan evaluasi triwulan,
- Data dukung kegiatan dan laporan internal BKD.

5. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan:

- Perbandingan target dan realisasi kinerja,
- Analisis tren capaian kinerja,

- Analisis efisiensi (rasio kinerja terhadap anggaran),
- Identifikasi gap dan akar permasalahan.

6. Perumusan Rekomendasi

Hasil evaluasi digunakan untuk menyusun rekomendasi strategis yang bersifat:

- Korektif (perbaikan jangka pendek),
- Preventif (pencegahan masalah berulang),
- Pengembangan (peningkatan kualitas kinerja).

F. Sistematika Penulisan Laporan

BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Dasar Hukum
- I.3. Tujuan dan Manfaat
- I.4. Ruang Lingkup
- I.5. Metodologi Evaluasi
- I.6. Sistematika Penulisan Laporan

BAB II GAMBARAN KEBIJAKAN RENJA TAHUN 2025

- II.1. Visi dan Misi RENJA Tahun 2025
- II.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sesuai RENJA Tahun 2025
- II.3. Target Kinerja RENJA Tahun 2025

BAB III EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TAHUN 2025

- III.1. Evaluasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2025
- III.2. Faktor Pendorong
- III.3. Evaluasi Penghambat
- III.4. Tindak Lanjut Penyelesaian Faktor Penghambat

BAB IV PENUTUP

- IV.1. Tingkat Capaian Kinerja RENJA Tahun 2025
- IV.2. Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut Perencanaan Berikutnya

BAB II GAMBARAN KEBIJAKAN RENJA TAHUN 2025

A. Visi dan Misi RENJA Tahun 2025

Rencana Kerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 di buat dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029. Adapun Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :



Dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam pencapaian **Misi Kelima** yaitu **Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat, tata kelola pemerintahan, serta kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.** Dengan sasaran strategis ke 24 yaitu **Meningkatnya kualitas perencanaan berbasis data dan peningkatan kapasitas serta kualitas SDM aparatur pemerintahan.** Dalam lingkup bidang kepegawaian, misi ini mengisyaratkan perlunya BKD selaku unsur penunjang urusan pemerintahan pada pelayanan kepegawaian untuk melakukan reformasi birokrasi pada bidang manajemen ASN.

B. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sesuai RENJA Tahun 2025

Sebagai penjabaran dari visi misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, maka tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah periode 2021-2026 yang ingin dicapai yaitu :

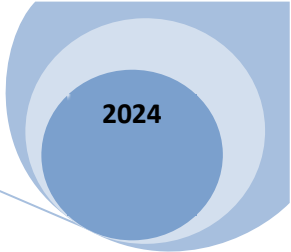
Tabel 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan RENJA BKD Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (IKU)	Target 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub	Pagu Indikatif (Rp)
1	Terwujudnya tata kelola ASN berbasis data	Data ASN terintegrasi	Persentase data ASN terintegrasi	100%	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Data Kepegawaian, Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	% data terupdate	100%	297.739.484
2	Pengelolaan kebutuhan ASN tepat	Kebutuhan ASN terpenuhi	% pemenuhan kebutuhan ASN	95%	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN; Mutasi dan Promosi ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK; Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian; Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN; Pengelolaan Mutasi ASN	Dokumen formasi	1 dok	578.129.311,00
3	Kompetensi ASN meningkat	ASN memenuhi standar kompetensi	% ASN $\geq$ 20 JP	90%	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Dokumen	1 dok	47289622
4	Pengisian JPT berbasis merit	JPT terisi sesuai ketentuan	Jumlah JPT terisi	100%	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah JPT terisi	51 Orang	764431833

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (IKU)	Target 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub	Pagu Indikatif (Rp)
5	Penataan jabatan administrasi	Jabatan administrasi optimal	Jumlah jabatan adm	Sesuai kebutuhan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen evaluasi	1 dok	764431833
6	Penguatan jabatan fungsional	JF meningkat	Jumlah JF	meningkat	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan Kompetensi ASN	Penataan Jabatan Fungsional ASN	Dokumen evaluasi	1 dok	62877425
7	Profesionalitas ASN meningkat	Indeks profesionalitas meningkat	Indeks Profesionalitas ASN	≥ target nasional	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pembinaan ASN	Penilaian IP ASN	Nilai indeks	1 laporan	3819434966
8	Disiplin ASN meningkat	Pelanggaran menurun	% penurunan pelanggaran	10% turun	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pembinaan Disiplin	Penanganan Kasus Disiplin	Jumlah kasus ditindak	5-10 laporan	190674267
9	Pelayanan kepegawaian optimal	Layanan tepat waktu	% layanan tepat waktu	98%	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pelayanan Administrasi	Layanan Kepegawaian Terpadu	% layanan tepat waktu	98%	3819434966
10	Kompetensi ASN terukur	ASN lulus uji kompetensi	% kelulusan kompetensi	85%	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Uji Kompetensi	Assessment ASN	% ASN lulus	85%	764431833
11	Akuntabilitas meningkat	Nilai SAKIP meningkat	Nilai SAKIP	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan LKIP	Nilai evaluasi	A	267.349.383

C. Target Kinerja Rencana Kerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

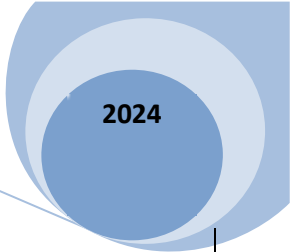
Target kinerja Rencana Kerja (RENJA) BKD Tahun 2025 adalah sasaran kinerja spesifik yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam jangka waktu 1 tahun yaitu pada tahun 2025. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 sebanyak 2 Program dan 12 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :



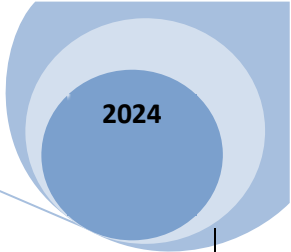
Tabel 3.3.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 ;

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
05.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	PROV KALTENG	1 tahun	12.726.783.400,00	PAD	-		12.726.783.400,00
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	PROV KALTENG	1 tahun	1.365.000.000,00	PAD	-	1 tahun	1.365.000.000,00
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tergunakannya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	PROV KALTENG	12 laporan	475.000.000,00	PAD	-	12 laporan	475.000.000,00
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pelayanan umum kantor dan informasi publik	PROV KALTENG	12 laporan	890.000.000,00	PAD	-	12 laporan	890.000.000,00
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi	PROV KALTENG	1 tahun	2.406.755.400,00	PAD	-	1 tahun	2.406.755.400,00

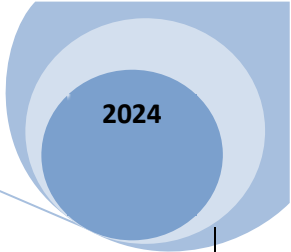
Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025



		Umum Perangkat Daerah							
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	PROV KALTENG	1200 Buah	75.976.500,00	PAD	-	1200 Buah	75.976.500,00
5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor, peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	PROV KALTENG	4 Jenis	1.263.878.900,00	PAD	-	4 Jenis	1.263.878.900,00
5.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk pegawai berupa koran dan peraturan perundang undangan selama 1 tahun	PROV KALTENG	2 Media	37.000.000,00	PAD	-	2 Media	37.000.000,00
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terkoordinasinya dan terkonsultasikannya program dan kegiatan kepegawaian dan tersedianya makan minum rapat koordinasi pegawai selama 1 tahun	PROV KALTENG	12 Laporan	1.000.000.000,00	PAD	-	12 Laporan	1.000.000.000,00



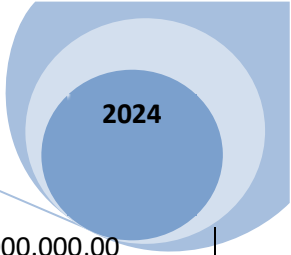
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	PROV KALTENG	1 Paket	29.900.000,00	PAD	-	1 Paket	29.900.000,00
5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya BMD Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PROV KALTENG	1 Tahun	75.000.000,00	PAD	-	1 Tahun	75.000.000,00
5.03.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor	PROV KALTENG	1 Paket	75.000.000,00	PAD	-	1 Paket	75.000.000,00
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemda	PROV KALTENG	1 Tahun	1.130.500.000,00	PAD	-	1 Tahun	1.130.500.000,00
5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perbaikan perlengkapan kerja yang rusak	PROV KALTENG	200 Unit	32.500.000	PAD	-	200 Unit	32.500.000
5.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	PROV KALTENG	2 Gedung	800.000.000,00	PAD	-	2 Gedung	800.000.000,00
5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Terpeliharanya kendaraan bermotor dan Terbayarkannya	PROV KALTENG	30 Unit	275.000.000,00	PAD	-	30 Unit	275.000.000,00



	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pajak kendaraan bermotor selama 1 tahun							
5.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya secara rutin/berkala prasarana pendukung gedung kantor	PROV KALTENG	37 Unit	23.000.000,00	PAD	-	37 Unit	23.000.000,00
5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PROV KALTENG	1 tahun	25.418.000,00	PAD	-	1 tahun	25.418.000,00
5.03.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terasuransikannya dan tertatanya aset dan inventarisasi BKD Prov Kalteng	PROV KALTENG	1,491 Unit	25.418.000,00	PAD	-	1,491 Unit	25.418.000,00
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi keuangan Daerah pada Perangkat Daerah	PROV KALTENG	1 tahun	7.421.393.000,00	PAD	-	1 tahun	7.421.393.000,00
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	PROV KALTENG	52 Orang / Bulan	7.390.000.000,00	DAU PAD	-	52 Orang / Bulan	7.390.000.000,00
5.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan semesteran aset	PROV KALTENG	1 Laporan	15.529.000,00	PAD	-	1 Laporan	15.529.000,00

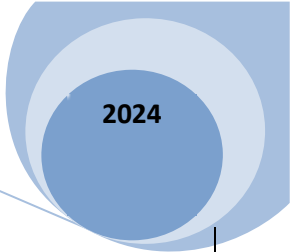
5.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	PROV KALTENG	1 Laporan	15.864.000,00	PAD	-	1 Laporan	15.864.000,00
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terkelolanya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada Perangkat Daerah	PROV KALTENG	1 tahun	162.231.000,00	PAD	-	1 tahun	162.231.000,00
5.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	PROV KALTENG	10 Laporan / Dokumen	84.166.000,00	PAD	-	10 Laporan / Dokumen	84.166.000,00
5.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	PROV KALTENG	7 Dokumen	78.065.000,00	PAD	-	7 Dokumen	78.065.000,00
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah	PROV KALTENG	1 tahun	140.486.000,00	PAD	-	1 tahun	140.486.000,00
5.03.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pengadaan pakaian dinas selama 1 tahun	PROV KALTENG	100 Buah	75.000.000,00	PAD	-	100 Buah	75.000.000,00

5.03.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksanannya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PROV KALTENG	5 Orang	10.000.000,00	PAD	-	5 Orang	10.000.000,00
5.03.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksanannya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	PROV KALTENG	100 Orang	55.486.000,00	PAD	-	100 Orang	55.486.000,00
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Terkelolanya administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah	PROV KALTENG	1 tahun	12.288.500.000,00	PAD	-	1 tahun	12.288.500.000,00
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksanannya pengembangan kompetensi ASN	PROV KALTENG	1 tahun	83.000.000,00	PAD	-	1 tahun	83.000.000,00
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksanannya Seleksi dan Monitoring Tugas Belajar dan Ijin Belajar	PROV KALTENG	4 Dokumen	45.000.000,00	PAD	-	4 Dokumen	45.000.000,00
5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Tertatanya Jabatan Fungsional di Pemprov Kalteng	PROV KALTENG	800 SK	38.000.000,00	PAD	-	800 SK	38.000.000,00
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksanannya mutasi dan promosi ASN	PROV KALTENG	1 tahun	925.000.000,00	PAD	-	1 tahun	925.000.000,00



5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terkelolanya Kenaikan Pangkat PNS	PROV KALTENG	4800 Dokumen	200.000.000,00	PAD		4800 Dokumen	200.000.000,00
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Terisinya Jabatan Struktural dan Jabatan Pimpinan Tinggi pada Pemprov Kalteng	PROV KALTENG	800 Dokumen	650.000.000,00	PAD		800 Dokumen	650.000.000,00
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya proses Mutasi PNS	PROV KALTENG	100 Dokumen	75.000.000,00	PAD		100 Dokumen	75.000.000,00
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja ASN	PROV KALTENG	1 tahun	215.000.000,00	PAD		1 tahun	215.000.000,00
5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terkelolanya penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dan kasus cerai PNS	PROV KALTENG	250 Orang	105.000.000,00	PAD		250 Orang	105.000.000,00
5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Terkelolanya Pemberian Penghargaan Bagi PNS	PROV KALTENG	250 PNS 2 Kegiatan	85.000.000,00	PAD		250 PNS 2 Kegiatan	85.000.000,00
5.03.02.1.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Terkelolanya Dokumen Proses Izin Perceraian Bagi PNS	PROV KALTENG	10 Laporan	25.000.000	PAD		10 Laporan	25.000.000

5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya pengadaan PNS, administrasi pemberhentian PNS dan Informasi Kepegawaian PNS	PROV KALTENG	1 tahun	11.065.500.000,00	PAD		1 tahun	11.065.500.000,00
5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya pengadaan CPNS dan PPPK	PROV KALTENG	1 Laporan / Dokumen	275.000.000,00	PAD		1 Laporan / Dokumen	275.000.000,00
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Administrasi Pemberhentian pegawai purna tugas BUP	PROV KALTENG	300 Dokumen	78.000.000,00	PAD		300 Dokumen	78.000.000,00
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	PROV KALTENG	1 Dokumen	85.000.000,00	PAD		1 Dokumen	85.000.000,00
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian Pemerintah	PROV KALTENG	1 Dokumen	350.000.000,00	PAD		1 Dokumen	350.000.000,00



		Provinsi Kalimantan Tengah							
5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya fasilitasi kelembagaan Profesi ASN (KORPRI)	PROV KALTENG	1 Lembaga	5.650.000.000,00	PAD		1 Lembaga	10.277.500.000,00
	TOTAL				21.591.908.845,00				25.015.283.400,00

BAB III EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TAHUN 2025

A. Evaluasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2025

Indikator target program dan kegiatan adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu program, kegiatan, yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu kebijakan terhadap tujuannya. Capaian kinerja dalam RENJA BKD Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan daerah pada bidang kepegawaian.

Berikut ini merupakan capaian Kinerja RENJA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 :

LAPORAN EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025
Periode Pelaksanaan: Tahun 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD provinsi

- 1.
- 2.
- 3.
4. dst

Formulir 4

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Renja Tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Capaian Anggaran Tahun 2025 Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Capaian Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (Realisasi akhir 2025)		Realisasi Kinerja dan Realisasi Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025 (kolom 13 = kolom 6 + kolom 12)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025 (%) kolom 14 = kolom 13 / kolom 7 X 100		Unit Penanggung Jawab
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		12		13		14			
					K	Satuan	Rp	K	Tingkat Capaian (%)	Rp	K	Tingkat Capaian (%)	Rp	K	Tingkat Capaian (%)	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
11	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	KEPEGAWAIAN		100,00	21.591.908.845,00		11,76	2.430.392.001,00		43,90	5.582.831.209,00		76,27	11.237.266.191,00	99,42	2.430.392.001,00	186,11	35.737.584.506,00	136,40	185,51	BKD		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100,00	11.415.908.845,00		11,02	2.189.181.897,00		53,26	5.003.986.920,00		79,49	8.846.078.756,00	98,83	2.189.181.897,00	193,68	16.634.636.929,00	144,27	145,89	BKD	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terkelolanya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Perangkat Daerah	Persentase	100,00	210.000.000,00	25,48	25,48	18.380.000,00	63,33	63,33	20.060.000,00	79,29	79,29	103.043.400,00	100,00	255.177.089,00	193,46	358.871.414,00	143,46	170,89	BKD	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase	100,00	7.182.000.000,00	20,00	20,00	1.777.991.693,00	56,00	56,00	3.587.962.548,00	66,00	66,00	5.683.566.135,00	100,00	7.955.544.044,00	192,97	14.812.529.051,00	142,97	206,25	BKD	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase	100,00	35.000.000,00	0,00	0,00	672.000,00	5,00	5,00	672.000,00	95,00	95,00	9.001.000,00	100,00	19.988.038,00	195,33	31.802.738,00	145,33	90,86	BKD	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Persentase	100,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	101.640.000,00	100,00	153.418.170,00	195,31	366.157.070,00	145,31	244,10	BKD	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100,00	1.713.908.845,00	4,00	4,00	81.197.273,00	43,17	43,17	633.314.273,00	83,00	83,00	1.112.659.364,00	100,00	2.206.756.446,00	198,38	6.150.286.038,00	148,38	358,85	BKD	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0							94,42	120.863.600,00	94,42	0,00	BKD		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100,00	1.050.000.000,00	12,50	12,50	257.430.831,00	75,00	75,00	668.561.299,00	87,50	87,50	1.257.269.753,00	100,00	1.922.254.345,00	189,74	3.351.442.690,00	139,74	319,19	BKD	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100,00	1.075.000.000,00	15,17	15,17	53.510.100,00	30,34	30,34	93.416.800,00	45,64	45,64	578.899.104,00	100,00	1.934.433.836,00	199,27	1.840.144.663,00	149,27	171,18	BKD	
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi pada Unit Kerjanya	Persentase	100,00	10.176.000.000,00		12,50	241.210.104,00		34,54	578.844.289,00		73,04	2.391.187.435,00	100,00	3.382.337.770,00	176,54	19.420.587.764,00	128,54	190,85	BKD	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase	100,00	6.640.000.000,00	20,00	20,00	101.188.000,00	48,00	48,00	210.654.000,00	76,00	76,00	1.532.583.921,00	100,00	1.956.335.458,00	198,24	18.593.918.231,00	148,24	280,03	BKD	
		Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	Persentase	100,00	2.800.000.000,00	3,33	3,33	60.270.154,00	16,67	16,67	239.254.777,00	90,00	90,00	530.276.935,00	100,00	955.772.906,00	174,84	2.285.849.279,00	124,84	81,64	BKD	
		Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase	100,00	201.000.000,00	7,67	7,67	11.818.560,00	37,50	37,50	37.261.762,00	74,17	74,17	57.038.862,00	100,00	99.091.329,00	181,76	216.010.787,00	131,76	107,47	BKD	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase	100,00	535.000.000,00	19,00	19,00	67.933.390,00	36,00	36,00	91.673.750,00	52,00	52,00	271.287.717,00	100,00	371.138.077,00	189,98	1.128.302.948,00	139,98	210,90	BKD	

- 1.
- 2.
- 3.
4. dst

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) Renja Tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Capaian Anggaran Tahun 2025 Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Capaian Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (Realisasi akhir 2025)	Realisasi Kinerja dan Realisasi Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 205 Kolom 13 = (kolom 6 + kolom 12)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025 (%) kolom 14 = kolom 13 / kolom 7 X 100	Unit Penanggung Jawab					
			4	7	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		12	13		14						
					K	Satuan	K	Rp	K	Tingkat Capaian (%)	Rp	K	Tingkat Capaian (%)	Rp	K		Tingkat Capaian (%)	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	K	Satuan	K	Rp	K	Tingkat Capaian (%)	Rp	K	Tingkat Capaian (%)	Rp	K	Tingkat Capaian (%)	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15	
Jumlah/Total					100,00	21.591.908.845,00		11,56	2.430.392.001,00		46,46	5.582.831.209,00		77,14	11.237.266.191,00		17.829.909.738,00		21.147.404.189,00		121.068.981.710,00				
Rata-rata capaian kinerja (%)							11,56			46,46			77,14			100,00									
Predikat kinerja							Sangat Rendah			Sangat Rendah			Tinggi			Sangat Tinggi									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:			1. Koordinasi yang baik dengan stakeholder																						
			2. Ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, serta fasilitas																						
			3.																						
			4.																						
			dst																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:			1. Kebijakan dan peraturan baru yang dapat menambah beban kepatuhan dan biaya bagi perangkat daerah																						
			2.																						
			3.																						
			4.																						
			dst																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):			1. Optimalisasi Digitalisasi Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah																						
			2. Penyelenggaraan Manajemen Talenta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah																						
			3.																						
			4.																						
			dst																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah provin			1. Optimalisasi Digitalisasi Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah																						
			2. Penyelenggaraan Manajemen Talenta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah																						
			3.																						
			4.																						
			dst																						

*) = tidak perlu di isi



Evaluasi capaian kinerja Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2025 dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Secara umum, pelaksanaan RENJA BKD Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik dan cenderung optimal, ditandai dengan:

- Mayoritas indikator kinerja utama (IKU) mencapai target atau melampaui target,
- Terjadi peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian berbasis digital,
- Meningkatnya profesionalitas ASN melalui penguatan manajemen talenta dan pengembangan kompetensi.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum optimal akibat faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program.

Tabel 4 Capaian Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Awal RPJMD	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian 2025	Kriteria / kode	Target Akhir RPJMD
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pelayanan Kepegawaian yang Prima dan Profesional	Persentase Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Persentase	83%	95%		111.96%	Sangat Tinggi	95%
		Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date	Persentase	85%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%
		Persentase Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi	Persentase	70%	85%	76.12%	89.55%	Tinggi	90%
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan	Persentase	65%	80%	98%	123.09%	Sangat Tinggi	85%

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Awal RPJMD	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian 2025	Kriteria / kode	Target Akhir RPJMD
		pelatihan formal							
		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	54	51	35	68.63%	Sedang	54
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	1006	1015	2420	238.42%	Sangat Tinggi	1017
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	6000	6600	6278	95.12%	Sangat Tinggi	6800
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	75.50	78.00	81.5	104.49%	Sangat Tinggi	78.50
		Persentase penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase	0,10%	0,10%	0,09%	90%	Sangat Tinggi	0.10%
		Persentase usulan pelayanan kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	Persentase	80%	90%	100%	111.1%	Sangat Tinggi	95%
		Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN	Persentase	70%	90%	100%	111.1%	Sangat Tinggi	75%
		Nilai SAKIP	Nilai	-	100	80.40	80.4%	Tinggi	100

B. Analisis Capaian Kinerja

a. Indikator dengan capaian sangat Tinggi

Indikator yang melampaui target menunjukkan:

- Efektivitas program pengembangan kompetensi ASN,
- Optimalisasi sistem informasi kepegawaian,
- Penguatan manajemen talenta berbasis merit system.

Faktor pendukung:

- Digitalisasi layanan (e-Kinerja, SIASN, Srikandi),
- Komitmen pimpinan,
- Sinergi antar perangkat daerah.

b. Indikator dengan Capaian Baik (Belum Optimal)

Beberapa indikator belum mencapai target maksimal, seperti:

- Pengisian jabatan berbasis kompetensi,
- Kelulusan uji kompetensi ASN.

Penyebab:

- Keterbatasan SDM assessor/asesmen,
- Kesiapan kompetensi ASN yang belum merata,
- Dinamika regulasi dan kebijakan nasional.

C. Analisis Efisiensi dan Efektivitas

a. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Secara umum, pelaksanaan program menunjukkan efisiensi yang baik:

- Output tercapai dengan penggunaan anggaran yang terkendali,
- Optimalisasi teknologi informasi mengurangi biaya operasional,
- Kegiatan berbasis digital meningkatkan produktivitas.

b. Efektivitas Program

Program dinilai efektif karena:

- Selaras dengan sasaran strategis,
- Memberikan dampak langsung pada peningkatan kinerja ASN,
- Mendukung reformasi birokrasi dan sistem merit.

D. Faktor Pendorong

Keberhasilan pencapaian kinerja RENJA BKD Tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan dan Kebijakan Strategis

Adanya komitmen kuat dari pimpinan daerah dan pimpinan perangkat daerah dalam mendukung implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit serta reformasi birokrasi.

2. Penguatan Sistem Informasi Kepegawaian

Pemanfaatan aplikasi digital seperti e-Kinerja, SIASN, dan SRIKANDI yang meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan kepegawaian.

3. Penerapan Manajemen Talenta ASN

Implementasi talent pool dan sistem merit dalam pengisian jabatan berdampak pada meningkatnya profesionalitas ASN dan ketepatan penempatan jabatan.

4. Peningkatan Kompetensi ASN

Pelaksanaan pelatihan, uji kompetensi, dan asesmen secara berkelanjutan yang mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas ASN.

5. Sinergi Antar Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal

Kolaborasi yang baik antara BKD dengan perangkat daerah lain serta instansi seperti Badan Kepegawaian Negara dalam pembinaan dan pengelolaan ASN.

6. Digitalisasi dan Simplifikasi Proses Bisnis

Transformasi layanan kepegawaian menjadi berbasis elektronik yang mempercepat proses pelayanan serta mengurangi potensi kesalahan administratif.

E. Evaluasi Penghambat

Di samping faktor pendorong, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi capaian kinerja RENJA Tahun 2025, antara lain:

1. Keterbatasan SDM Pengelola Kepegawaian

Jumlah dan kompetensi SDM yang menangani manajemen ASN belum sepenuhnya memadai, terutama dalam bidang asesmen dan pengelolaan data.

2. Belum Optimalnya Integrasi Sistem Informasi

Masih terdapat perbedaan dan keterbatasan integrasi antar aplikasi kepegawaian, sehingga mempengaruhi validitas dan sinkronisasi data ASN.

3. **Kesenjangan Kompetensi ASN**

Tingkat kompetensi ASN yang belum merata antar perangkat daerah, sehingga mempengaruhi pencapaian indikator terkait profesionalitas dan pengembangan kompetensi.

4. **Keterbatasan Anggaran pada Kegiatan Strategis**

Beberapa program prioritas belum dapat dilaksanakan secara optimal akibat keterbatasan alokasi anggaran.

5. **Dinamika Kebijakan Nasional**

Perubahan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat, khususnya terkait manajemen ASN dan reformasi birokrasi, memerlukan penyesuaian yang cepat di daerah.

6. **Resistensi terhadap Perubahan**

Sebagian ASN masih memerlukan waktu untuk beradaptasi terhadap transformasi digital dan penerapan sistem kerja berbasis kinerja.

Secara evaluatif, faktor pendorong yang dominan menunjukkan bahwa transformasi digital dan penguatan sistem merit telah menjadi **key driver** dalam peningkatan kinerja BKD Tahun 2025. Namun demikian, faktor penghambat terutama pada aspek SDM dan integrasi sistem menjadi **critical constraint** yang perlu segera ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.

F. Tindak Lanjut Penyelesaian Faktor Penghambat

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal, perlu dilakukan upaya-upaya seperti :

1. Penguatan Kapasitas SDM Pengelola Kepegawaian

- Melaksanakan pelatihan teknis dan sertifikasi bagi pengelola kepegawaian, khususnya di bidang asesmen kompetensi dan pengelolaan data ASN.
- Mendorong pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan jabatan (*competency-based training*).

2. Integrasi dan Penguatan Sistem Informasi Kepegawaian

- Mengembangkan integrasi data antar sistem kepegawaian daerah dengan sistem nasional (SIASN).
- Optimalisasi penggunaan aplikasi digital seperti SRIKANDI untuk mendukung efisiensi administrasi.

- Melakukan rekonsiliasi dan validasi data ASN secara berkala untuk memastikan akurasi dan konsistensi data.
3. Pemerataan dan Peningkatan Kompetensi ASN
 - Menyusun peta kebutuhan kompetensi ASN berbasis jabatan dan unit kerja.
 - Mengoptimalkan penerapan manajemen talenta sebagai dasar pengembangan karier ASN.
 4. Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran
 - Menyusun prioritas program berbasis kinerja dan dampak (*performance-based budgeting*).
 - Mengarahkan alokasi anggaran pada kegiatan yang memiliki kontribusi langsung terhadap IKU.
 - Mendorong efisiensi melalui digitalisasi dan simplifikasi proses bisnis.
 5. Adaptasi terhadap Kebijakan Nasional
 - Melakukan harmonisasi kebijakan daerah dengan regulasi pusat secara cepat dan responsif.
 - Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pembina seperti Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara.
 - Menyusun pedoman teknis internal untuk mempercepat implementasi kebijakan baru.
 6. Penguatan Manajemen Perubahan (*Change Management*)
 - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi budaya kerja berbasis kinerja dan digital.
 - Mengimplementasikan sistem reward and punishment berbasis kinerja untuk mendorong perubahan perilaku.

Tindak lanjut yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi telah diarahkan pada **transformasi sistemik** melalui penguatan SDM, digitalisasi layanan, dan optimalisasi tata kelola berbasis kinerja. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap faktor penghambat tidak hanya diselesaikan secara jangka pendek, tetapi juga diantisipasi secara berkelanjutan dalam kerangka reformasi birokrasi dan sistem merit ASN.

A. Tingkat Capaian Kinerja Rencana Kerja BKD Tahun 2025

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang manajemen ASN daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM dan sumber pendanaan serta sarana prasarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka capaian kinerja RENJA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dinyatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Sangat Tinggi** dengan capaian 100%.

Hal ini mengindikasikan bahwa:

- Perencanaan kinerja telah disusun secara realistis dan terukur,
- Pelaksanaan program berjalan efektif dan efisien,
- BKD mampu berkontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas ASN dan reformasi birokrasi di daerah.

Tingkat capaian kinerja RENJA BKD Tahun 2025 tidak hanya menunjukkan keberhasilan administratif, namun juga mencerminkan **transformasi kinerja organisasi yang berbasis hasil (outcome-oriented)**, dengan dukungan sistem merit, digitalisasi layanan, serta penguatan manajemen kinerja ASN secara berkelanjutan.

B. Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut Perencanaan Berikutnya

Evaluasi RENJA Tahun 2025 menegaskan bahwa BKD Provinsi Kalimantan Tengah telah berada pada jalur yang tepat dalam mewujudkan organisasi yang adaptif, profesional, dan berbasis kinerja. Ke depan, fokus penguatan diarahkan pada **transformasi sistemik dan keberlanjutan reformasi birokrasi**, sehingga capaian kinerja tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan RENJA BKD Tahun 2025, diperlukan langkah-langkah strategis dalam penyusunan perencanaan

tahun berikutnya guna meningkatkan kualitas kinerja, efektivitas program, serta keberlanjutan reformasi birokrasi.

1. Penguatan Perencanaan Berbasis Kinerja

- Menyusun perencanaan RENJA Tahun 2026 yang lebih terarah dan berbasis hasil (outcome-oriented).
- Menyelaraskan program dan kegiatan dengan tujuan strategis Renstra 2025–2029 serta kebijakan kepala daerah.
- Mengintegrasikan indikator kinerja secara lebih terukur dan relevan dengan sasaran pembangunan ASN.

2. Penyempurnaan Indikator Kinerja dan Target

- Melakukan review dan penyempurnaan indikator kinerja utama (IKU) agar lebih spesifik, terukur, dan realistis.
- Menetapkan target kinerja berbasis capaian tahun sebelumnya dan *benchmarking* nasional.
- Mengurangi indikator yang bersifat output dan memperkuat indikator berbasis outcome.

3. Penguatan Manajemen Talenta dan Sistem Merit

- Mengembangkan sistem manajemen talenta ASN secara lebih terstruktur dan terintegrasi.
- Menjadikan hasil asesmen kompetensi sebagai dasar utama dalam pengisian jabatan.
- Meningkatkan transparansi dan objektivitas dalam promosi dan mutasi ASN.

4. Integrasi dan Digitalisasi Sistem Kepegawaian

- Melanjutkan pengembangan dan integrasi sistem informasi kepegawaian daerah dengan sistem nasional.
- Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi seperti SRIKANDI dan sistem kepegawaian lainnya untuk meningkatkan efisiensi layanan.
- Mendorong penggunaan data terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan (data-driven policy).

5. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja

- Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital dan real time.
- Melakukan evaluasi kinerja secara berkala (triwulan) untuk memastikan ketercapaian target.

- Menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan perencanaan secara berkelanjutan.

6. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi

- Memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah serta instansi pembina seperti Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PANRB.
- Mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan kompetensi dan manajemen ASN.
- Mengintegrasikan perencanaan BKD dengan agenda reformasi birokrasi nasional.

Rencana tindak lanjut perencanaan Tahun 2026 diarahkan tidak hanya pada penyempurnaan teknis perencanaan, tetapi juga pada **transformasi tata kelola ASN yang adaptif, berbasis data, dan berorientasi hasil**. Pendekatan ini diharapkan mampu memastikan keberlanjutan capaian kinerja serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan.